



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KESIMPULAN
RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI
DENGAN**

**MENTERI SOSIAL RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KEUANGAN
RI, MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KESEHATAN RI, SERTA MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI**

**MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022
RABU, 13 APRIL 2022**

Pada Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Pimpinan DPD RI, dengan agenda "Pembahasan atas RUU tentang Penanggulangan Bencana" disimpulkan sebagai berikut:

Komisi VIII DPR RI dan DPD RI, serta Pemerintah RI sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana pada Tingkat I karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB. Komisi VIII DPR RI tetap berpegang pada RUU Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB disebutkan secara eksplisit dalam RUU Penanggulangan Bencana, sementara Pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini akan diatur dalam Peraturan Presiden untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden.

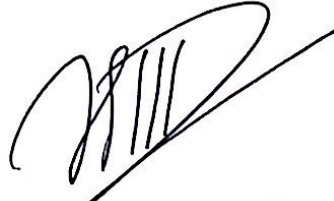
**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt

**A/n PIMPINAN DPD RI,
ANGGOTA KOMITE II**

AJL MIRNI MAWARNI, ST., MM.

MENTERI SOSIAL RI,



DR. TRI RISMAHARINI

**A/n MENTERI KEUANGAN RI,
DIRJEN ANGGARAN**



ISA RACHMATARWATA

**A/n MENTERI KESEHATAN RI,
DIRJEN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT**



dr. MAXI REIN RONDONUWU, MARS

**A/n MENTERI DALAM NEGERI RI,
DIREKTUR MANAJEMEN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN
KEBAKARAN**



Drs. Edy Suharmanto, M.Si

**MENTERI PAN DAN RB RI,
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM**

Drs. IMANUDDIN